

DINAMIKA KEAMANAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

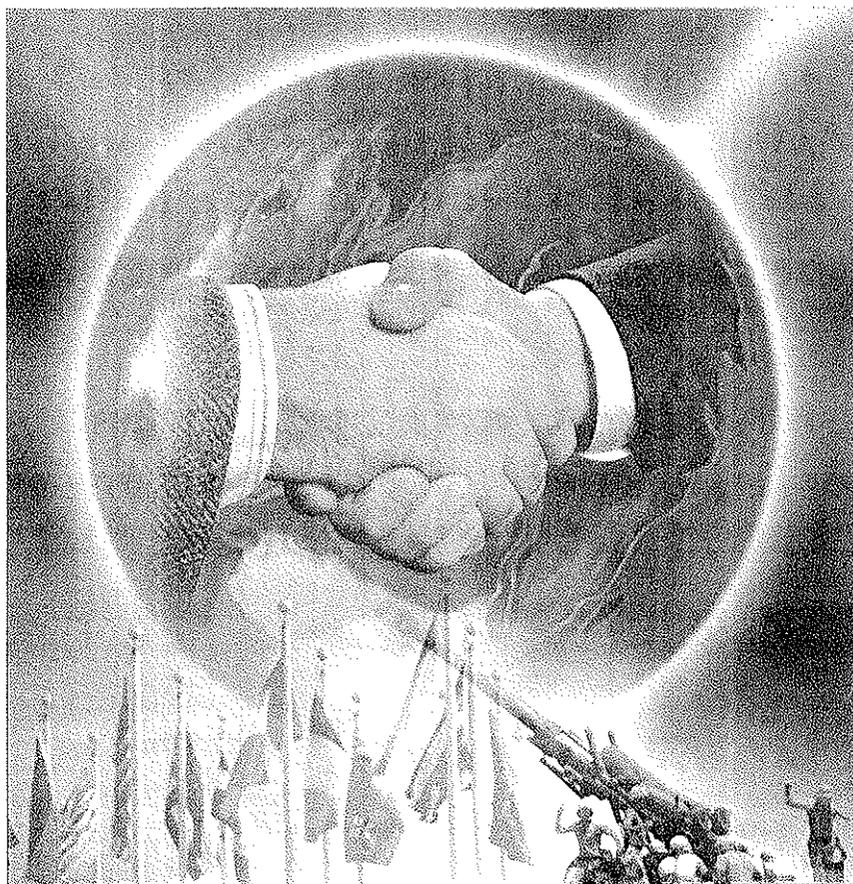
Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D



SIDANG TERBUKA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
UPACARA PENGUKUHAN GURU BESAR
BANDUNG, 12 JANUARI 2008

DINAMIKA KEAMANAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D



SIDANG TERBUKA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
UPACARA PENGUKUHAN GURU BESAR
BANDUNG, 12 JANUARI 2008

Daftar Isi

Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional Kontemporer dan Implikasinya Bagi Indonesia.....	1
Riwayat Hidup Singkat.....	29
Daftar Riwayat Hidup.....	31
Daftar Penelitian, Buku, Jurnal, Makalah yang dipresentasikan dan artikel Populer terpilih.....	36
Susunan Acara.....	49

Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional Kontemporer dan Implikasinya Bagi Indonesia

Yang terhormat,
Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten,
Ketua Yayasan Universitas Katolik Parahyangan,
Rektor Universitas Katolik Parahyangan,
Ketua Senat, para Guru Besar dan anggota Senat Universitas Katolik Parahyangan,
Para Wakil Rektor,
Para Dekan Fakultas, Wakil Dekan, dan para Dosen
Beserta keluarga besar Universitas Katolik Parahyangan,
Ibu-ibu dan Bapak-bapak undangan,
Dan para wakil mahasiswa,
Yang berbahagia.

Security is primarily about the fate of human collectivities...about the pursuit of freedom from threat. The bottom line is about survival, but it also includes a substantial range of concerns about the conditions of existence...Security is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal, and environmental (Barry Buzan, 1991)

A nation can be said to have assured its own security when it is militarily, economically and technologically developed, politically stable and socio-culturally cohesive.

Pendahuluan

Dua buah kutipan diatas dengan cukup jelas menunjukkan kompleksitas keamanan dalam kehidupan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila konsep keamanan (*security*) merupakan salah satu konsep yang paling sering diperdebatkan dalam tata interaksi umat manusia di dunia ini. Konsep ini adalah juga konsep yang paling sering mengalami perubahan pemaknaan sesuai dengan perkembangan interaksi sosial manusia. Hal ini terutama dikarenakan keamanan merupakan salah satu elemen dasar kehidupan manusia.

Dalam berbagai literatur disiplin keilmuan Hubungan Internasional, konsep ini kini mendapat sorotan tajam sejalan dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam konteks lokal, nasional maupun global. Dalam tataran global, perubahan secara substansial ini diawali dengan berakhirnya Perang Dingin, mengemukanya arus globalisasi (baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan keamanan), munculnya isu-isu non-tradisional seperti-- serangan-serangan teroris terhadap eksistensi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia, arus demokratisasi dsb. Dalam tataran nasional dan lokal, urgensi keamanan ditandai dengan maraknya konflik komunal dan ikatan parokial lainnya, dan semakin rusaknya daya lingkungan hidup-- seperti penebangan kayu yang tak terkendali dan eksploitasi sumber daya alam lainnya--yang tentunya juga membawa dampak negatif bagi tata kehidupan global.

Begitu pula dengan aktor-aktor yang terlibat dalam keamanan tidak lagi hanya difokuskan pada aktor negara tetapi kini juga perlu memperhatikan peran aktor non negara seperti organisasi kejahatan transnasional, kelompok teroris. Bahkan kini kita menyaksikan mengemukanya aktor-aktor transnasional dan aktor non negara yang memiliki kapasitas aksi secara global.

Hal ini tentu saja akan memiliki dampak yang sangat besar bagi terciptanya keamanan dan ketidakamanan baik dalam skala lokal, nasional, maupun global.¹

Berbagai perkembangan diatas, tentunya, membawa konsekwensi yang sangat besar bagi pemahaman menyeluruh konsep dan isu keamanan baik pada tataran nasional, regional dan global. Pertanyaannya kini, bagaimana kita dapat memaknakan konsep diatas dalam konteks hubungan internasional kontemporer? Bagaimana pula kaitannya dengan isu perbatasan negara kita?

Keamanan: Suatu tinjauan konseptual .

Secara etimologis konsep keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin "*securus*" (*se + cura*) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger; free from fear*). Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan kata *se* (yang berarti tanpa / *without*) dan *curus* (yang berarti '*uneasiness*). Sehingga bila digabungkan kata ini bermakna '*liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats*'.²

Sementara itu dalam berbagai literatur ilmu Hubungan Internasional, para sarjana Hubungan Internasional berargumen bahwa konsep keamanan merupakan sebuah "*contested concept*". Pendekatan tradisional yang didominasi oleh mashab Realisme menyatakan bahwa konsep keamanan merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara-bangsanya dari serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternal (*the absence of a military threat or with the protection of the nation from external overthrow or attack*)³.

¹Lihat misalnya United Nations Development Programme (1999). Human Development Report. New York: Oxford University Press.

²Lihat Liota P. H (2002). Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security. Dalam Security Dialogue. Vol.33. No.4. hlm. 473-488.

³Helga Haftendorn (1991). The Security Puzzle: Theory, Building and Discipline in International Security. Dalam International Studies Quarterly, Vol.35. No.1.hlm.3-17.

Sejalan dengan pemahaman diatas, kapabilitas militer suatu negara untuk mempertahankan diri merupakan sebuah keharusan. Hal senada juga diungkapkan Walter Lippmann, misalnya, yang menyatakan bahwa “*a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war*”.⁴ Sedangkan, Arnold Wolfers memaknakan konsep keamanan sebagai berikut, “*Security, in any objective sense, measures the absence of threats to acquired values and in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*”.⁵

Kendati pun beberapa contoh definisi keamanan di atas menunjukkan persamaan dalam hal kebebasan terhadap ancaman-ancaman (militer) namun, konsepsi diatas juga secara jelas mengindikasikan perbedaan “*referent*”⁶ atau aktor keamanan (individual, nasional atau internasional). Secara tradisional, konsep keamanan selama ini memang hanya merujuk pada sifat ancaman yang bersifat militer semata sehingga responnya pun hanya bersifat militer dan hanya memfokuskan pada unit/aktor negara.

Sejalan dengan perkembangan-perkembangan yang begitu cepat dalam hubungan internasional, Barry Buzan yang merupakan tokoh penggerak pendekatan yang kerap disebut sebagai “*the widening School/the widener*” memperluas makna konsep keamanan dengan argumentasi bahwa keamanan tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor negara semata melainkan akan meliputi aspek-aspek non militer dan melibatkan pula aktivitas aktor non-negara.⁷

⁴Sebagaimana dikutip dalam Baylis, John, Smith, Steve (2001). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 255.

⁶Ibid.

⁷Banyak teoritis Hubungan Internasional yang berargumen bahwa pada dasarnya konsep ini mengacu pada peringkat analisis. Lihat misalnya Alagappa, Muthiah (1998). *Rethinking Security: A Critical Review and Appraisal of the Debate*. Dalam Alagappa, Muthiah. *Asian Security practice: Material and Ideational Practices*. California: Stanford University press. Hlm.28-31.

Pada dekade 1990an, PBB memberikan definisi konsep keamanan sebagai berikut:

The concept of security must change from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security.⁸

Sementara itu, konferensi negara-negara Afrika yang tergabung dalam Organization for African Unity (OAU) yang diselenggarakan pada tahun 1991 telah pula memberikan artikulasi baru terhadap konsep keamanan, yakni:

The concept of security goes beyond military considerations. It must be construed in terms of the security of the individual citizens to live in peace with access to basic necessities of life while fully participating in the affairs of his/her society in freedom and enjoying all fundamental human rights.⁹

Dalam bukunya yang bertajuk "*People, States and Fear*", Buzan membagi sektor keamanan ke dalam 5 bidang: Militer, politik, lingkungan, ekonomi dan *societal*¹⁰. Menurut pendekatan ini, sektor militer hanyalah salah satu aspek penting dari konsep keamanan. Sementara itu, keamanan yang lebih luas dan menyeluruh akan dipengaruhi pula oleh sektor politik, ekonomi, *societal* dan lingkungan baik dari peringkat individu, nasional, regional dan global. Sektor keamanan militer dan keamanan non-militer serta berbagai peringkat analisis dapat digambarkan secara menyeluruh dalam matriks berikut ini.

⁷ Buzan, Barry (1997). *Rethinking Security After the Cold War*. Dalam *Cooperation and Conflict: The Nordic Journal of International Studies*, Vol.32.No.1,hlm. 5-28.

⁸ Lihat UNDP (1993). *Human Development Report: People's Participation*. Oxford: Oxford University Press.

⁹ Sebagaimana dikutip dari Peter Hough (2004). *Understanding Global Security*. London: Routledge. Hlm. 13.

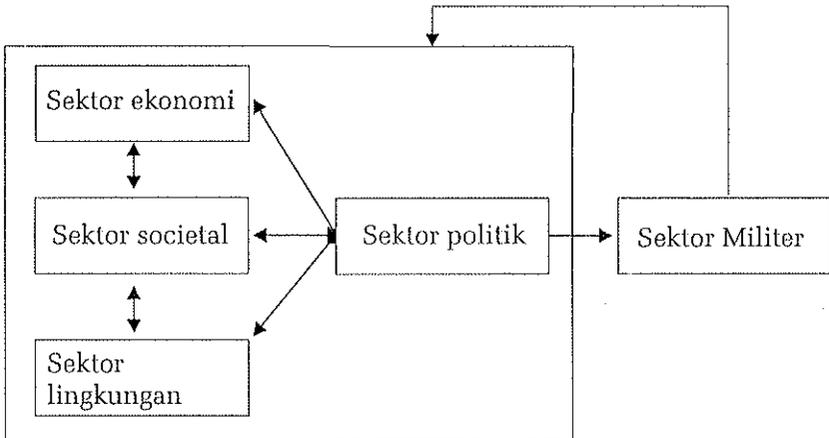
¹⁰ Lihat Buzan, Barry (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers

Sektor Keamanan

Peringkat Analisis	Keamanan Non-militer				Keamanan Militer
	politik	ekonomi	societal	lingkungan	
individual					
nasional					
regional					
internasional					

Lebih jauh, berbagai sektor militer dan non-militer juga saling mempengaruhi satu sama lain. Keterkaitan antara kedua aspek keamanan diatas dapat digambarkan sebagai berikut.

Sektor keamanan non militer



Dari gambar disamping dapat ditarik suatu pemahaman bahwa aspek/sektor ekonomi, misalnya, harus ditransfer menjadi aspek politik untuk dapat memiliki pengaruh negatif atau positif terhadap keamanan dan kemudian akan berpengaruh terhadap sektor militer. Begitu pula sebaliknya, sektor militer akan memiliki dampak pula pada sektor-sektor lainnya. Contoh kasus sederhana dapat kita berikan mengenai kemampuan ekonomi RRC yang semakin meningkat dapat berubah menjadi sebuah keputusan politik untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Sebaliknya, keputusan politik untuk memperkuat kapabilitas militer juga akan menyedot sumber ekonomi yang begitu besar (sektor ekonomi). Begitu pula dengan contoh kasus lainnya, kebutuhan ekonomi AS, dalam hal ini kebutuhan terhadap akses sumber daya minyak, telah berubah menjadi keputusan politik untuk melakukan serangan militer terhadap Irak. Sementara itu, keputusan politik AS untuk melakukan serangan militer/perang terhadap Irak telah pula mempengaruhi dimensi ekonominya.

Klasifikasi antara berbagai dimensi keamanan diatas dan unit analisa terhadap studi keamanan dalam hubungan internasional dapat digambarkan dalam matriks berikut¹¹.

¹¹ Alkira, Sabina (2002). A Conceptual Framework for Human Security. CRISE Working Paper No.2. Oxford: University of Oxford.pp.17.

What is the Source of the Security Threat ?

	Military	Military, Non-military, or Both
States	National security (Conventional realist approach to security studies)	Redefined security (e.g., environmental and economic [cooperative or comprehensive] security)
Security for Whom ? Societies Groups, and Individuals	Intrastate security (e.g., civil war, ethnic conflict, and democide)	Human security (e.g., environmental and economic threats to the survival of societies, groups, and individuals)

Dari matriks diatas kita dapat melihat bahwa sumber ancaman tidak lagi hanya bersifat militer, bahkan dalam banyak kasus sumber ancaman bisa sekaligus bersifat militer dan non-militer. Lebih lanjut, keamanan pun bukan hanya ditujukan bagi kelangsungan negara saja tetapi juga menjadi kebutuhan bagi semua aktor lainnya termasuk individu. Sebagaimana yang ditulis dalam *Report of the Secretary-General's High-Level Panels on Threats, Challenges and Changes*, "Today, more than ever before, a threat to one is a threat to all. The mutual vulnerability of weak and strong has never been clearer"¹²

¹² United Nations (2004). *A More Secured World: Our Shared Responsibility. Report of the Secretary-General's High-Level Panels on Threats, Challenges and Changes*. New York: United Nations Department of Public Information, hlm. 14.

Berbagai konsepsi ancaman keamanan diatas selain menunjukkan adanya perluasan makna dari perspektif tradisional menuju non tradisional, juga melibatkan aktor yang beragam (*non-state*) yang terlihat dari dinamika interaksi antar sektor dan aktor keamanan. Dalam perkembangan berikutnya, Buzan, Waever dan de Wilde mengkonseptualisasikan keamanan sebagai sesuatu yang harus '*...staged as existential threats to a referent object by securitizing actor who thereby generates endorsement of emergency measures beyond rules that would otherwise bind*'.¹³

Definisi diatas, tentunya, memunculkan beberapa pertanyaan lanjutan, seperti apa yang dimaksud dengan '*existential threat*'?, Siapa yang menjadi '*referent*'? dan apa yang dimaksud '*securitizing actor*'? Pemahaman terhadap konsep diatas menjelaskan kepada para penstudi hubungan internasional bahwa sekuritisasi pada dasarnya meliputi masalah-masalah keamanan yang tidak saja diangkat menjadi agenda politik. Selain itu, isu-isu keamanan yang memperoleh status sebagai '*existential threat*' menuntut adanya upaya-upaya tindakan nyata yang begitu besar untuk mengatasi berbagai isu atau ancaman keamanan yang dihadapi para '*referent actor*'.

Lebih lanjut, studi mengenai proses sekuritisasi adalah studi mengenai retorika/jargon yang digunakan dalam keterkaitannya dengan ancaman. Ketiga penulis diatas menggunakan istilah '*speech-act*' untuk menangkap pemahaman mengenai ancaman sebagai hasil dari konstruksi persepsi ancaman bersama¹⁴. Dengan demikian, para penstudi hubungan internasional/keamanan dapat membedakan secara tegas konsep sekuritisasi dengan konsep politisasi.

¹³ Buzan, Barry, Waever, Ole, de Wilde, Jaap (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publisher, hlm.5.

¹⁴ *ibid.*, hlm. 24-26.

Tingkat kerumitan dari sifat dan struktur sistem internasional yang dihasilkan oleh interaksi para unit/aktor yang semakin tinggi memunculkan pula beberapa alat/lensa analisa tambahan lainnya yang dapat digunakan untuk memotret baik sifat, tipe aktor dan interaksi keamanan yang dihasilkannya. Lensa analisa tersebut berupa sektor analisis (*sector of analysis*) yang terdiri dari 5 bagian¹⁵. Sektor pertama adalah militer. Sektor ini mengacu pada hubungan-hubungan militer para unit/aktor dan biasanya memfokuskan pada kapabilitas militer unit/aktor baik yang bersifat defensif maupun ofensif. Sektor ini juga mengacu pada persepsi ancaman (militer) dan *threat assesment* dari para unit/aktor terhadap unit/aktor lainnya.

Berikutnya adalah sektor politik yang merujuk pada hubungan otoritas, legitimasi politik unit/aktor. Sektor ini, misalnya, memfokuskan pada sifat hubungan antar unit/aktor apakah bersifat hirarki atau setara. Sektor ekonomi adalah sektor ketiga yang memusatkan perhatiannya pada hubungan perdagangan, produksi, keuangan diantara para unit/aktor. Sektor ini merujuk pula pada hubungan antar unit/aktor dalam pasar internasional dan akses terhadap perdagangan/perekonomian internasional.

Sementara sektor keempat berupa sektor *societal*/sosio-kultural yang mengacu pada hubungan sosial dan kebudayaan antar unit/aktor. Interaksi dalam hubungan ini berupa penyebaran ide (identitas kolektif, kultur, bahasa, dan agama) antar unit individu dan kelompok individu dalam masyarakat internasional. Arti penting sektor ini dalam Hubungan Internasional kontemporer, terlebih pada paska perang Dingin, semakin meningkat ketika kebangkitan agama menjadi salah satu sektor utama pembentuk interaksi internasional¹⁶. Bahkan Scott M Thomas

¹⁵Buzan, Barry, Little, Richard (2000). *International System in World History: Remaking the Study of International Relations*. Oxford:Oxford University Press hlm.72-74.

¹⁶ Lihat misalnya, Hayness, Jeff (2001). *Religion*. Dalam White, Brian, Little, Richard, Smith, Michael ed. *Issues in World Politics*. Hampshire: Palgrave.hlm.153-170.

menyatakan bahwa kebangkitan agama terutama di negara-negara Dunia Ketiga merupakan bagian dari 'pemberontakan negara-negara Dunia ketiga terhadap dominasi negara-negara Barat' (*revolt against the West*)¹⁷ dalam sistem internasional kontemporer.

Sektor terakhir adalah lingkungan yang mencakup hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungan biologinya sebagai bagian dari sistem pendukung penting dalam interaksi internasional. Berbagai sektor diatas, tentunya bukanlah merupakan sektor-sektor yang saling terpisahkan. Baik secara teoritis dan faktual, berbagai sektor diatas terkait satu dengan yang lainnya.

Sekuritisasi isu maritim yang kini mengemuka di Selat Malaka dan Asia Tenggara, misalnya, menunjukkan dengan jelas keterkaitan antara sektor militer, politik, ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Dengan demikian, sebuah kebijakan yang diambil dan aksi yang dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka memiliki daya jangkauan yang sangat luas bukan saja terhadap peringkat analisa (sistem internasional, subsistem internasional, negara dan individu), namun akan melibatkan pula berbagai sektor analisis (militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan) yang sangat rumit.

Lima Dimensi Keamanan dan Keamanan Nasional yang Menyeluruh.

Untuk menghasilkan suatu pemahaman menyeluruh terhadap berbagai dimensi keamanan itu sendiri tentu kita harus melihatnya dari berbagai dimensi. Dimensi pertama yang perlu kita ketahui dari konsep keamanan adalah "*the origin of threats*". Bila pada masa Perang Dingin, ancaman-

¹⁷ Thomas, Scott M (2000). Taking Religious and Cultural Pluralism Seriously: The Global Resurgence of Religion and The Transformation of International Society. Dalam Millenium: Journal of International Studies. Vol.29.No.3. Hlm.817.

ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari pihak luar/eksternal sebuah negara maka pada masa kini, ancaman-ancaman dapat berasal dari domestik dan global. Dalam hal ini, ancaman yang berasal dari dalam negeri biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti etnis, budaya dan agama yang termanifestasikan dalam konflik komunal.

Konflik-konflik serupa di atas juga melanda Indonesia. Dalam konteks Indonesia, konflik-konflik ini juga semakin diperuncing oleh karakteristik geografis (faktor alam dan sosial) Indonesia. Berbagai tindakan kekerasan (separatisme) yang dipicu oleh sentimen ethnonasionalis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, misalnya, telah pula menyedot perhatian nasional dan bahkan internasional.

Tatkala geliat-geliat separatisme seperti di atas semakin mengemuka dan menggelisahkan hati anak bangsa, kita dihadapkan pada keraguan yang amat besar terhadap masa depan dunia dan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan.

Dimensi kedua adalah "*The nature of threats*". Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional sebagaimana disebut di atas telah merubah pula sifat ancaman menjadi jauh lebih rumit. Dengan demikian, persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut pula aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup dan bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi, dan HAM.

Alhasil, sebagaimana dikemukakan Peter Chalk, fenomena global kontemporer diwarnai oleh "fenomena abu-abu" (*Grey Area Phenomena*). Fenomena ini secara longgar dapat didefinisikan sebagai "ancaman-ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional yang diakibatkan dari proses-proses interaksi aktor negara dan non negara"¹⁶.

¹⁶ Chalk, Peter (2000). *Non military security and global order*. Oxford: Oxford University Press.

Akibatnya, issue-issue yang mengemuka pun semakin beragam. Issue-issue baru ini meliputi: konflik SARA; ketidakamanan ekonomi (*economic insecurity*), dan degradasi lingkungan (termasuk pula kemungkinan penggunaan senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, biologi dan kimia oleh aktor negara dan non negara).

Mengemukanya berbagai isu diatas sebagai sifat-sifat baru ancaman berkorelasi amat kuat dengan dimensi ketiga yakni "*changing response*". Bila selama ini respon yang muncul adalah tindakan kekerasan/militer semata, maka kini isu-isu tersebut perlu pula diatasi dengan berbagai pendekatan non-militer. Dengan kata lain, pendekatan keamanan yang bersifat militeristik sepatutnya digeser oleh pendekatan-pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial-budaya.

Dimensi berikutnya yang juga akan mengarahkan kita pada perlunya perluasan penekanan keamanan non-tradisional adalah "*changing responsibility of security*". Bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara adalah 'organisasi politik' terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. Sementara itu, para penganut konsep keamanan 'baru' menyatakan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global.

Dimensi terakhir adalah "*core values of security*". Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada '*national independence*', kedaulatan, dan integritas teritorial, kaum nontradisional melihat mengemukanya nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru ini-kerap disebut sebagai keamanan nontradisional-- antara lain berupa penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya-upaya memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) baik itu perdagangan narkoba, *money laundering* dan terorisme.

Secara sederhana, perbedaan antara pendekatan tradisional dan non-tradisional dalam memandang konsep keamanan dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut¹⁹:

	Tradisional	Non Tradisional
Asal ancaman (<i>origin of threats</i>)	Negara rival	Non-negara: domestik dan transnasional
Sifat ancaman (<i>nature of threats</i>)	Kapabilitas	Non-militer: ekonomi, politik domestik, lingkungan hidup, terorisme, penyakit menular, narkoba
Respon (<i>the responses</i>)	Militer	Non-militer: liberalisasi ekonomi, demokratisasi, hak asasi manusia
Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan (<i>the responsibility for providing security</i>)	Negara	Negara, organisasi internasional, individu
Nilai inti (<i>core values</i>)	Kemerdekaan nasional, integritas teritorial, kedaulatan	Kesejahteraan ekonomi, hak asasi manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup.

¹⁹Benyamin Miller (2001). The Concept of Security: Shuld it be Redefined. Dalam The Journal of Strategic StudiesHlm.23

Keamanan Nasional Indonesia: Studi Kasus Isu Perbatasan Negara

Buku Putih Pertahanan RI 2003, misalnya, secara tegas menyatakan RI masih memiliki sejumlah persoalan wilayah perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Berbagai persoalan wilayah perbatasan yang belum terselesaikan dengan baik tersebut adalah dengan negara-negara Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste, dan Republik Palau.²⁰ Sejumlah persoalan wilayah perbatasan yang belum tuntas ini tentunya memiliki konsekuensi negatif pada berbagai dimensi keamanan nasional Indonesia, seperti dimensi keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan.²¹

Batas (negara) memainkan peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara dan bahkan batas negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara sebagai upaya membentuk tata interaksi antar negara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis. Hubungan internasional kontemporer dan agenda politik luar negeri tetap akan masih didominasi oleh persoalan tradisional batas-batas negara. Hal ini tentunya sangat terkait dengan persoalan keamanan nasional, kedaulatan teritorial dan efektifitas politik luar negeri dan bahkan diplomasi yang diperankan oleh sebuah negara. Gagalnya diplomasi Indonesia tatkala mengemukakan isu kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia dan ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di perairan Ambalat merupakan contoh kasus betapa wilayah perbatasan negara memainkan peranan yang sangat penting dalam hubungan bernegara.

²⁰Lihat buku putih pertahanan RI, Ministry of Defence (2003). *Defending The Country Entering the 21st Century*. Jakarta: Ministry of Defence, hlm. 24-25.

²¹Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Barry Buzan (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.

Di sisi lain, fenomena globalisasi dengan berbagai macam aspeknya seakan meluluhkan batas-batas tradisional antar negara dan menghapus jarak fisik antarnegara. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan persenjataan telah menunjukkan pula betapa tapal batas negara menjadi sesuatu yang semakin kurang relevan dalam hubungan internasional pada era globalisasi dewasa ini. Globalisasi, menurut Anthony Mc Grew, bukan saja telah menjadikan teritorialitas di banyak negara menjadi semakin kurang relevan, melainkan juga mempertanyakan eksistensi kedaulatan teritorial yang dimiliki sebuah negara-bangsa.²² Ironisnya, perkembangan yang terjadi di banyak negara berkembang pada era globalisasi ini menunjukkan kondisi yang sangat berbeda.

Identitas dan Negara Lemah/Gagal (Weak/Failed State)

Dalam banyak kasus di banyak negara berkembang, persoalan batas negara yang belum dapat dikelola dengan baik bahkan juga menjadi salah satu indikator bahwa negara tersebut sangat lemah atau bahkan telah gagal (*Weak/failed state*).²³ Hal ini, misalnya ditandai dengan ketidakmampuan negara dalam mengelola secara fisik pengelolaan wilayah perbatasannya. Selain itu, ketiadaan administrasi yang efektif dalam mengatur batas wilayahnya juga menjadi persoalan tersendiri yang menambah rumit persoalan batas wilayah negara.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, fenomena pembentukan kabupaten dan provinsi baru bisa dilihat pula dari mengemukakan sentimen lokalitas dengan membentuk dan bahkan menuntut pembentukan wilayah perbatasan baru. Alhasil, beberapa pemerintahan kabupaten dan atau

²² Lihat misalnya, Anthony Mc Grew (2000). *Power Shift: From National Government to Global Governance*. Dalam David Held ed. *A Globalizing World?: Culture, Economics and Politics*. London: Routledge, hlm.127-168.

²³ Lihat Stewart Patrick (2006). *Weak States and Global Threats: Fact or Fiction*. Dalam *The Washington Quarterly*, Vol.29, No.2, hlm.27-53.

provinsi baru kini berupaya untuk mempertegas batas wilayahnya masing-masing. Salah satu ilustrasi mengenai hal ini adalah permintaan DPRD dan pemerintah provinsi Banten kepada DPRD dan Pemerintah DKI Jakarta untuk mempertegas batas wilayah kepulauan Seribu.²⁴ Apabila persoalan seperti diatas tidak dapat diatasi secara komprehensif, tentunya akan berdampak buruk pada integrasi nasional Indonesia. Konsekwensi terburuk dari kegagalan negara dalam memelihara wilayah perbatasan dan integritas teritorialnya adalah tercabik-cabiknya negara tersebut dalam perang sipil yang akan bermuara pada fragmentasi dan disintegrasi.²⁵

Terbatasnya dan rendahnya kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorialnya baik udara, laut dan darat juga akan memiliki dampak yang sangat dalam baik secara internal dan eksternal. Kompleksitas persoalan wilayah perbatasan ini secara tradisional bukan saja akan mendorong terjadinya *intrastate conflict/war* bahkan juga akan memicu terjadinya konflik antar negara dan *interstate war*. Hal ini dikarenakan bukan saja dipicu oleh prinsip kesatuan teritorialitas tetapi juga dipertegas oleh prinsip kedaulatan yang selama ini memang telah menjadi kepentingan pertama dan utama dari setiap negara-bangsa. Secara tradisional, setiap negara-bangsa akan siap melakukan apa saja untuk mempertahankan kedaulatannya wilayahnya.²⁶

Lebih jauh, Kari Laitinen juga mengungkapkan persoalan perbatasan (negara) bukan saja melulu mencakup persoalan teritorial semata, melainkan juga akan meliputi berbagai aspek kehidupan lainnya seperti

²⁴Lihat "Banten Minta batas Wilayah Kepulauan Seribu", harian KOMPAS, 28 Maret 2006.

²⁵Lihat misalnya, Julian Saurin (1995) *The End of International Relations? The State and International Theory In The Age of Globalization*. Dalam John MacMillan, Andrew Linklater, *Boundaries In Question: New Directions In International Relations*. London: Pinter Publishers, hlm. 244-261.

²⁶Mengenai dinamika konsep kedaulatan, lihat misalnya Daniel Philpott (2001). *Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations*. New Jersey: Princeton University Press, hlm.5-10.

sumberdaya dan kebanggaan identitas yang dalam konteks tertentu akan menjadi faktor penting terhadap kebanggaan lokal dan nasional dalam politik luar negerinya.²⁷ Pada titik ini, persoalan perbatasan akan menjadi isu yang sangat penting dalam agenda keamanan nasional. Dengan demikian, sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan akan memainkan peranan penting dalam agenda pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sementara itu dalam konteks hubungan internasional, ada banyak kasus pula yang dapat kita sebut untuk sekadar memberikan ilustrasi konflik antar negara yang berawal dari belum terselesaikannya berbagai persoalan tapal batas negara. Dengan kata lain, berbagai perkembangan hubungan internasional kontemporer dewasa ini telah membawa warna kontradiktif dalam hubungan antar aktor (baik negara maupun non negara). Di satu sisi, mengemukakan sentimen (etno) nasionalisme dan berbagai bentuk keterikatan identitas (lokal dan nasional) lainnya serta keinginan untuk mempertahankan sumberdaya (alam) semakin memperkuat pentingnya makna tapal batas. Munculnya kasus Ambalat antara Indonesia dan Malaysia adalah salah satu kasus yang dapat kita gunakan untuk memahami hal diatas.

Secara tradisional, hubungan internasional memusatkan perhatiannya pada studi mengenai pola-pola politik luar negeri yang membentuk hubungan antar aktor negara yang diikat oleh batas-batas teritorial/kewilayahan. Ruang teritorial yang dimiliki oleh negara ini kemudian akan menentukan kedaulatan, power dan bahkan keamanan yang dimiliki oleh negara.²⁸

²⁷Lihat Kari Laitinen (2004). *Reflecting the Security Border in The Post Cold War Context*.

²⁸ Mengenai hal ini lihat misalnya Mike Bowker, Robin Brown (1993). *From Cold War to Collapse: Theory and World Politics In The 1980s*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm.2.

Oleh karenanya, batas dan luas teritorial memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan eksistensi suatu negara. Gagasan utama dari penentuan batas teritorial ini adalah untuk membedakan negara secara fisik. Selain itu, batas negara juga menjadi alat untuk mengontrol aliran barang, gagasan, dan bahkan ideologi.

Agar dapat mengontrol hal di atas dalam sebuah ruang geografi, sebuah unit negara akan membutuhkan kekuatan militer yang sekaligus pula akan berfungsi untuk melindunginya dari kemungkinan gangguan kedaulatan berupa ancaman militer yang berasal dari lingkungan eksternalnya. Gagasan untuk melindungi keamanan batas wilayahnya (*security border*) bersandar pada pemikiran Realisme klasik yang sangat menekankan *self-help system*. Dengan kata lain, konsep *security border* akan membawa konsekuensi pada kemampuan penangkalan (*deterrence*), kekuatan angkatan bersenjata (*military forces*) dan dilema keamanan (*security dilemma*) dalam interaksinya dengan aktor negara lainnya.

Bahkan bagi Realist klasik seperti Hans. J Morgenthau, kepentingan keamanan nasional yang sangat fundamental adalah "*to protect [its] physical, political, and cultural identity against encroachments by other nations*"²⁰. Lebih jauh, setiap Negara-bangsa harus mencapai kepentingan nasionalnya '*defined in terms of power*' untuk melindungi keamanannya (*security*) wilayahnya dan kelangsungan hidupnya (*survival*). Dalam argumen Realisme, kepentingan nasional memainkan peranan yang sangat krusial dimana melalui konsep ini, kebutuhan keamanan suatu aktor Negara-bangsa memiliki kaitan yang sangat erat antara kedaulatan negara dan karakteristik sistem internasional, seperti anarki dan *distribution of power*, dengan semua kebijakan luar negeri dan tindakan yang diambil aktor Negara.

²⁰Dikutip dalam Jutta Welds (1996). *Constructing National Interests*. Dalam *European Journal of International Relations*. Vol.2. No.3, hlm.275-318.

Namun, persoalan batas negara dan keamanan nasional akan memunculkan wajah berbeda di kebanyakan negara-negara berkembang. Studi yang dilakukan Robert I. Rotberg secara eksplisit mengindikasikan salah satu karakteristik penting dari negara gagal (*failed states*) adalah ketidakmampuannya dalam menyelesaikan persoalan batas negara yang kemudian mendorong terjadinya *intra* dan *interstate war* secara hampir bersamaan.³⁰ Penataan dan pengelolaan batas-batas negara secara lebih baik, dengan demikian, akan menjadi prasyarat utama bagi upaya menciptakan sebuah negara kuat (*strong state*)³¹.

Di sisi lain, sebagaimana diutarakan Georg Sorensen, persoalan terbesar untuk menciptakan sebuah keamanan nasional yang kuat justru kerap kali terhambat oleh keterbatasan kemampuan, kalau tidak dikatakan ketidakmampuan, negara. Hal ini terutama ditunjukkan oleh agenda negara yang sangat disibukkan dengan berbagai persoalan domestik termasuk mempertahankan rejim pemerintahan semata, dan kemampuan yang terbatas dalam mengelola kondisi ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan negara (termasuk di dalamnya untuk menjaga semua perbatasan negara dan wilayah teritorialnya).³² Sehingga tidaklah mengherankan apabila kita memperoleh informasi bahwa sebagian besar penyelundupan dan pencurian sumber daya alam kita begitu tinggi karena lemahnya pengawasan wilayah perbatasan darat dan laut kita.

³⁰Robert I. Rotberg (2004). *The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair*. Dalam Robert I. Rotberg ed. *When States Fail: Causes and Consequences*. New Jersey: Princeton University Press, hlm.1-50.

³¹ Merujuk pada penjelasan Sorensen, negara kuat ditunjukkan dengan institusi dan mekanisme politik yang sudah matang, kinerja ekonomi yang baik, pengelolaan wilayah teritorial yang baik, tata kelola pemerintah yang juga baik, dan identitas nasional yang kuat. Lihat Georg Sorensen (1996) *Individual Security and National Security: The State Remains the Principal Problem*. Dalam *Journal Security Dialogue*. Vol.27, No.4. hlm.375-390.

³²Ibid.

Keamanan Militer dan Non Militer dalam Isu Perbatasan

Bagi banyak negara berkembang, seperti Indonesia misalnya, isu perbatasan negara dan keamanan nasional kerap menjadi persoalan yang sangat dilematis. Aspek pertahanan yang merujuk pada kemampuan untuk mengatasi berbagai ancaman militer yang berasal dari lingkungan internasional akan berbaur dengan aspek ancaman non militer. Tidak seperti negara-negara maju lainnya, negara-negara berkembang harus menghadapi sekaligus berbagai isu pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik yang begitu rumit dan terkait erat dengan stabilitas internal serta kemampuan aspek pertahanan negara untuk melindunginya dari berbagai kemungkinan ancaman militer yang berasal dari lingkungan eksternal.

Dalam banyak kasus di negara-negara berkembang, berbagai isu pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik domestik di atas akhirnya menjadi bagian tidak terlepaskan dari isu pertahanan negara dan keamanan nasional. Bahkan, isu-isu diatas termasuk pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari *domestic vulnerabilities* yang kerap mendominasi agenda pembangunan keamanan nasional sehingga kemudian diterjemahkan pula sebagai obyek utama pertahanan negara.

Dipandang dari sisi penjelajahan literatur akademik, berbagai persoalan yang terkait satu sama lain seperti diatas telah menunjukkan signifikansi isu-isu non militer terhadap kemampuan melindungi keamanan nasional. Selain itu, negara gagal (*failed State*) yang tidak dapat melindungi wilayah perbatasannya akan menghadapi berbagai persoalan ketidakamanan wilayah perbatasannya yang muncul dari aktor non negara seperti kelompok penjahat transnasional (*transnational organized crime*) --yang menjalankan aksi kejahatan seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan barang dan manusia serta pencucian uang

(*money laundering*)-- dan kelompok teroris yang kerap memanfaatkan lemahnya kontrol wilayah perbatasan untuk merencanakan, mempersiapkan dan menggalang semua aksi terorismenya.³³

Salah satu ilustrasi terkini mengenai keterkaitan antara kejahatan transnasional dan aktivitas terorisme yang memanfaatkan wilayah perbatasan yang tidak terkontrol dengan baik adalah digunakannya wilayah perbatasan Thailand, Malaysia dan Indonesia oleh kelompok teroris dalam merancang, mempersiapkan dan melaksanakan aktivitas terorisme di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini.³⁴ Wilayah perbatasan di Thailand Selatan melalui provinsi Satun ke Sumatera (kepulauan Riau) melalui perairan Malaysia di sekitar Langkawi-Penang merupakan jalur darat dan laut favorit yang digunakan untuk mengalirkan dana, peredaran senjata, dan bahan peledak para pelaku terorisme untuk merancang aktivitas terorisme. Selain itu wilayah perbatasan Filipina Selatan dari Zamboanga dan Davao (Mindanao), menuju kepulauan Sulu menuju ke Sarawak dan Nunukan di Kalimantan serta Kepulauan Sangihe Talaud di Sulawesi Utara menuju Maluku dan Sulawesi Tengah ditengarai pula menjadi jalur penyaluran senjata dan manusia untuk melakukan kegiatan terorisme di wilayah timur Indonesia.³⁵ Melihat contoh kasus diatas, tidaklah berlebihan bila Harian The New York Times menyatakan bahwa, "*Failed states that cannot provide jobs and food for their people, that have lost chunks of territory to warlords, and that can no longer track or control their borders, send an invitation to terrorists*".³⁶

³³ Lihat Elke Krahmman (2005). *From State to Non-State Actors: The Emergence of Security Governance*. Dalam Elke Krahmman. *New Threats and New Actors in International Security*. New York: Palgrave MacMillan, hlm. 3-20.

³⁴ "Terorisme: Segitiga Maut Indonesia-Malaysia-Thailand", harian KOMPAS, 1 April 2006.

³⁵ Ibid

³⁶ Sebagaimana ditulis harian New York Times, July 2005. Dikutip dalam Stewart Patrick (2006), hlm.34. Penegasan kata-kata tercetak tebal dilakukan oleh penulis untuk kepentingan tulisan ini.

Dalam konteks ini, lemahnya kontrol terhadap wilayah perbatasan akan menjadi faktor pengganggu dalam diplomasi perbatasan yang harus Indonesia lakukan dengan beberapa negara tetangga. Dengan kata lain, hal ini juga akan menjadi titik lemah dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Pengalaman banyak negara berkembang yang cenderung lemah (*weak*) atau gagal (*failed*) tentang kompleksitas aktor dan isu militer dan non militer seperti tingkat pembangunan yang belum merata terutama di wilayah perbatasan, *overpopulation*, kejahatan lintas batas negara, degradasi lingkungan, dan persoalan sosial budaya, merupakan sumber ketidakamanan nasional dan sekaligus menjadi sumber masalah dalam politik luar negeri. Sebagaimana dikatakan Caroline Thomas,

“(national) security in the context of the third Worlds does not simply refer to the military dimension, as it often assumed in the Western discussion of the concept, but to the whole range dimensions of a state's existence which have been taken care of in the more developed states, especially those in the West”³⁷.

Sebuah ilustrasi sederhana tentang hal ini, misalnya, dapat ditemukan dalam dua buah berita berbeda yang dimuat di sebuah harian nasional. Harian Kompas (10 Maret 2006) mengetengahkan sebuah berita yang bertajuk “Keamanan RI Jadi Isu Utama”. Berita ini mengupas keengganan para investor Jepang untuk menanamkan modalnya dikarenakan ketidakstabilan keamanan dan kondisi sosial di Indonesia. Sementara dalam sebuah berita lain pada harian yang sama dan tanggal yang sama pula, terdapat sebuah berita bertajuk “Pos TNI di Pulau Terluar Papua” yang memberitakan upaya Kodam Trikora untuk membangun pos militer

³⁷ Dikutip dari Caroline Thomas (1991), *New Directions in Thinking about Security in the Third World*. Dalam Ken Booth ed. *New Thinking about Strategy and International Security*. London: Harper Collins Academic. hlm.269.

untuk mengamankan pulau-pulau terluar dari kemungkinan klaim dan atau ancaman militer pihak luar.

Selain itu, ditengarai pula wilayah perbatasan ini merupakan jalur lalulintas utama dari penyelundupan, pencurian kayu dalam jumlah besar (*illegal logging*) dan sumber daya kelautan lainnya (*illegal fishing*).³⁸

Tentu saja makna kata keamanan dalam berita pertama dan kedua memiliki perbedaan yang sangat tajam. Bila berita pertama dimaksudkan untuk melihat kondisi riil keamanan sosial domestik kita sehingga upaya yang patut dilakukan untuk mengundang investor asing membutuhkan beragam kebijakan non militer seperti ekonomi, hukum dan sosial budaya, maka pada berita kedua secara tegas mengacu pada aspek pertahanan wilayah teritorial kita dari kemungkinan klaim dan ancaman (militer) yang datang dari lingkungan eksternal kita. Oleh karenanya, membutuhkan respon yang bersifat militer pula untuk melindungi wilayah kedaulatan Indonesia. Namun tentunya patut pula kita akui bahwa respon militer semata tidaklah memadai. Diperlukan pula respon-respon lainnya termasuk aspek ekonomi, hukum, sosial budaya dan diplomasi untuk mendukung upaya melindungi kedaulatan teritorial kita.

Tingkat kerawanan di banyak negara berkembang semakin menjadi lebih tinggi tatkala berbagai persoalan diatas diperumit dengan berbagai persoalan lainnya seperti terbatasnya kapasitas sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan institusional (termasuk kekuatan militernya). Oleh karenanya, isu perbatasan negara dan keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari ancaman-ancaman militer dan non militer. Alhasil, pengelolaan dan pengawasan keamanan seluruh wilayah perbatasan akan mencakup berbagai dimensi baik militer, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan politik.

³⁸ Lihat Harian KOMPAS, 10 Maret 2006, hlm. 21 dan 25.

Rumitnya persoalan perbatasan negara yang kita miliki sekarang ini yang ditandai dengan beragam aspek seperti jenis ancaman, sifat ancaman, obyek keamanan nasional yang semakin meluas, keterbatasan sumber daya, persepsi ancaman yang juga begitu beragam, dan pendekatan dan instrumen kebijakan yang kita miliki, bukan saja harus selalu mendorong kita untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arti penting berbagai hal di atas, melainkan juga kita harus dapat menghasilkan perangkat sistem dan kebijakan yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan perbatasan wilayah negara dan keamanan nasional kita secara lebih lengkap dan utuh pula.

Secara internal, pengelolaan dan pengawasan semua (batas) teritorial bukan saja hanya akan memperkuat *nation-state building* tapi juga akan mendorong terciptanya *regional security building*. Hal ini, misalnya, dapat diupayakan dengan melakukan kerjasama dengan semua negara tetangga yang memiliki perbatasan wilayah dengan kita. Namun tentunya, sebelum hal ini dapat dicapai, sekali lagi, kita harus mampu melibatkan berbagai dimensi seperti ekonomi, dan sosial, hukum, dan diplomasi dalam mengelola wilayah perbatasan kita.

Meminjam kata-kata Rizal Sukma, pengelolaan wilayah perbatasan negara dan keamanan nasional Indonesia yang menyeluruh harus melibatkan empat komponen yang terintegrasi dalam sebuah kerangka kebijakan yang utuh, yakni: *Development, Democracy, Diplomacy and Defence*.³⁹ Egoisme sektoral yang tinggi untuk memisahkan berbagai komponen di atas dalam pengelolaan wilayah perbatasan, teritorial dan keamanan nasional kita hanya akan menjadikan Indonesia sebagai negara-bangsa yang terseok-seok dalam merespon berbagai perubahan baik yang terjadi dalam konteks lokal, nasional maupun global.

³⁹ Rizal Sukma (2005) War will never solve our problem, dalam The Jakarta Post, 21 Maret 2005.

Dari uraian diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mengingat perkembangan global yang kini sedang melanda dunia, konsep, isu maupun agenda keamanan patut dijawab secara multidimensional. Oleh karenanya, pemahaman menyeluruh terhadap konsep keamanan tidak hanya cukup dengan menggunakan pendekatan militer belaka namun harus mengintegrasikan berbagai pendekatan lainnya dan melibatkan semua komponen non-militer.

Dengan demikian, konsep keamanan yang komprehensif akan memiliki empat elemen penting yang harus kita perhatikan. Pertama, keamanan tidak lagi hanya didominasi oleh komponen militer semata. Kedua, keamanan merupakan produk dari kebijakan yang dihasilkan beragam aktor (negara maupun non-negara). Ketiga, keamanan merupakan interaksi yang bersifat interdependen yang dihasilkan dari interaksi pada kebijakan pada tataran lokal, nasional, regional dan global, dan terakhir, agenda keamanan juga bersifat majemuk.

Para hadirin sekalian,

Pada bagian akhir pidato ini, perkenankan saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menciptakan rasa aman dan memberikan lingkungan keamanan kepada saya selama ini. Lingkungan dan pihak pertama yang telah memberikan rasa aman bagi saya untuk mengembangkan diri adalah Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UNPAR. Suasana yang begitu kondusif yang telah menciptakan rasa aman bukan saja dirasakan oleh segenap mahasiswa tetapi juga sangat saya rasakan sejak saya kuliah di jurusan ini dan berhasil lulus S1 serta kemudian turut membantu mengembangkan salah satu jurusan paling prestisius di universitas ini dan juga (mungkin) di negeri ini. Terima kasih atas dukungan selama ini dan semoga kita dapat terus maju bersama selamanya. Lingkungan keamanan berikutnya adalah Universitas Katolik Parahyangan yang secara institusional telah

membawa rasa aman yang begitu besar bagi kehidupan saya selama ini. Terima kasih saya kepada semua jajaran pimpinan, Senat Unpar dan khususnya ibu Roosmaida yang kerap saya ganggu rasa amannya dalam mengurus semua prosedur birokratis yang sangat rumit ini. Semua kualifikasi akademik yang saya miliki sekarang ini juga tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan British Council, AusAID, Fulbright (AMINEF), dan DAAD yang telah memberikan keamanan ekonomi bagi saya untuk dapat merasakan berbagai petualangan akademik kepada saya selama ini.

Institusi lain yang juga telah membantu saya dalam menciptakan rasa aman dalam kehidupan akademik saya adalah *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) Jakarta yang telah cukup banyak membantu saya dalam mengasah berbagai ide dan pemikiran hubungan internasional. Selain itu, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, khususnya Badan Pendidikan dan Latihan, Dewan Ketahanan Nasional dan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, khususnya Biro Hubungan Internasional, kedeputian Politik dan Pro-Patria Institute yang juga telah menyediakan berbagai forum bagi saya untuk berkontribusi dalam menuangkan berbagai gagasan tentang studi keamanan dalam hubungan internasional dan implikasinya bagi Indonesia. Juga kepada berbagai media cetak dan elektronik nasional yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk turut meramaikan wacana isu hubungan internasional di tanah air. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Lingkungan keamanan berikutnya yang juga turut berperan serta bagi pengembangan diri saya adalah keluarga besar Anak Agung Gede Raka: ibu dan ayah tercinta serta adik-adik terkasih dan keluarga besar Wayan Gede Siadja: Ibu dan ayah tercinta almarhum serta kakak-adik ipar terkasih yang berada di Bali. Tanpa mereka semua saya tak mungkin dapat mencapai semua hal ini.

Last but certainly not least, lingkungan keamanan saya yang paling dekat adalah istri tercinta: Made Kusumayanthi, juga anak-anak terkasih: Kaka dan Wika. Mereka lah yang sungguh-sungguh telah menciptakan rasa aman dan bahagia bagi kehidupan saya.

Semoga apa yang telah saya raih selama ini juga dapat meningkatkan rasa aman mereka, terlebih ditengah seringnya saya meninggalkan keluarga. Sekali lagi terima kasih atas semuanya dan juga kepada pihak-pihak lain yang tidak saya sebutkan yang telah membantu dalam menciptakan rasa aman bersama. Terima kasih....

Semoga rasa damai dan aman selalu menyelimuti pikiran, hati dan alam semesta raya kita.

Bandung, 12 Januari 2008.

Riwayat Hidup Singkat

Anak Agung Banyu Perwita, lahir di Jakarta, 6 Februari 1967, merupakan putra pertama pasangan Anak Agung Gede Raka dan Nengah Sukarmini. Banyu, demikian ia biasa dipanggil, menyelesaikan pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas di lembaga pendidikan Katolik Pangudi Luhur, Jakarta. Sejak menempuh kuliah S1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, ia sangat terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Pada tahun 1988, ia menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unpar, lalu pada tahun 1990 menjadi Ketua I Senat Mahasiswa FISIP Unpar dan menjadi salah seorang pendiri Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah-Masalah Internasional (KSMPMI). Kelompok studi ini kini tetap hadir di tengah mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNPAR.

Dan sejak saat itu pula lah, ia terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi dan menjadi penulis kolom masalah hubungan internasional di berbagai media cetak nasional. Studi S-1 dari Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UNPAR diselesaikan pada Desember 1990. Setelah lulus, sempat menjadi wartawan lepas Majalah Teknologi dan Strategi Militer (TSM) yang kini sudah tidak terbit lagi. Banyu bergabung sebagai tenaga dosen tetap pada bulan Juli 1991. Pada tahun 1992, ia memperoleh beasiswa *British Chevening Scholarship* dari Pemerintah Inggris untuk meneruskan program pascasarjana dan memperoleh *MA in International Relations and Strategic Studies* dari Lancaster University-Inggris pada November 1994. Sepulangnya dari Inggris, ia menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (Feb 1995-Feb 1998).

Tahun 1998, ia memperoleh beasiswa *Australian Development Scholarship* untuk mengambil program Doktorat di Flinders University, Adelaide-Australia dan pada bulan Juli 2002 berhasil menyelesaikan studi

Doktoral dalam bidang Asian Studies dengan judul disertasi "*Between Secularisation and Islamisation: Indonesia's Foreign Policy Toward the Muslim World In the Soeharto Era*". Setelah menyelesaikan studi Doktoral, Banyu kemudian terlibat dalam berbagai jabatan struktural seperti Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (Nov 2003-Jan 2004), Pembantu Dekan IFISIP Unpar (Feb 2004-Juni 2004) dan menjadi Dekan FISIP Unpar (Juli 2004-Nov 2006). Kini ia menjabat sebagai Wakil Rektor Unpar bidang Hubungan dan Kerjasama (Des 2006-Nov 2011). Selain itu juga tetap aktif menulis di berbagai media cetak nasional dan terlibat dalam berbagai aktivitas akademik di lingkungan Departemen Luar Negeri RI, Departemen Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional RI dan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI

Selain aktivitas di atas, ia juga terlibat sebagai anggota-anggota Kelompok Kerja Reformasi Sektor Keamanan-Pro Patria, Senior Fellow, Center for Security and Defence Studies, Jakarta dan Overseas Member, Centro Argentino Estudios de Internacionale (CAEI), Argentina, Lead Institute, Jakarta

Banyu Perwita menikah dengan Made Kusumayanthi dan dikarunai dua putra: Anak Agung Dharma Sewaka Perwita (14 th) dan Anak Agung Satwika Perwita (11).



Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Anak Agung **Banyu** Perwita
 Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 6 Februari 1967
 Jabatan fungsional : Guru Besar
 Status : Menikah
 Nama Istri : Made Kusumayanthi Siadja, SE
 Nama Anak : Anak Agung Dharma Sewaka Perwita (14 th)
 Anak Agung Satwika Perwita (11 th)
 Alamat Kantor : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
 FISIP UNPAR, Jalan Ciumbuleuit 94
 Bandung 40142
 E-mail: banyu@home.unpar.ac.id
 Alamat Rumah : Jl. Pratista Barat VI/5 Pratista Antapani,
 Bandung 40291, telp: 022-7272372

 Jenjang Pendidikan : *Ph.D in Asian Studies*, Department of Asian
 Studies, Flinders University, Adelaide -
 Australia (2002)

*MA in International Relations and Strategic
 Studies*, Lancaster University, Inggris (1994)

Sarjana (Strata 1, Hubungan Internasional FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1990)

SMA Pangudi Luhur, Jakarta (1983-1986)

SMP Pangudi Luhur, Jakarta (1980-1983)

SD Pangudi Luhur, Jakarta (1974-1980)

Pekerjaan

External Examiner for Ph.D, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia. Sejak 2007

Dosen SESKOAD TNI AD sejak 2007

Dosen program studi *Master of Defence Management* ITB, sejak 2007

External Examiner (Program Doktorat Kajian Amerika) Universitas Indonesia, sejak 2006.

External Co-Supervisor (Ph.D), University of Gent, Belgia, sejak 2006.

Dosen Paskasarjana (Magister Ilmu Politik) Program Paskasarjana UNPAD sejak 2004

Dosen Paskasarjana (Magister Ilmu Sosial), Program Paskasarjana UNPAR sejak 2003

Dosen tetap HI FISIP UNPAR sejak 1991 (Strata 1)

Pengalaman Jabatan Struktural: Wakil Rektor bidang Hubungan dan Kerjasama UNPAR (2006-2011)

Dekan FISIP UNPAR
(Juli 2004-November 2006)

Wakil Dekan I FISIP UNPAR
(Februari-Juni 2004)

Sekretaris Jurusan HI FISIP UNPAR
(November 2003-Januari 2004)

Sekretaris Jurusan HI FISIP UNPAR
(1995-1998)

Pengalaman Penelitian:

DAAD Research Visiting Fellow, Indonesia Research Unit, Institute of Political Sciences, International Relations/Foreign Policy Studies, University of Giessen, Germany (2005).

Asian Political and International Studies Association (APISA) Research and Teaching Fellowship (2004), Kuala Lumpur-Malaysia.

Visiting Fellow, Clingendael Institute of International Relations, Den Haag-Netherlands (February 2004)

Fulbright Fellows, University of Southern Carolina, Columbia-USA (June-July 2003).

Asian Visiting Fellow, Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) Copenhagen-Denmark (March 2003)

Penghargaan:

AusAID Endeavour Indonesia Research Fellowship (2007)

DAAD Fellowship (2005)

Dosen Berprestasi I KOPERTIS IV Jawa Barat dan Banten (2004)

Fulbright Fellowship (2003)

Australian Development Scholarship (1998-2002)

Dosen Berprestasi I KOPERTIS IV Jawa Barat (1996)

British Chevening Scholarship (1993-1994)

Aktivitas lainnya:

Overseas Member, Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), Argentina (sejak 2006)

Senior Fellow Member, Centre for Security and Strategic Studies, Jakarta (sejak 2006)

Member, Indonesia Research Unit, Institute of Political Sciences, International Relations/Foreign Policy Studies, University of Giessen, Germany (sejak 2005).

Anggota, Kelompok Kerja Reformasi Sektor Keamanan, ProPatria (sejak 2002).

Daftar Penelitian, Buku, Jurnal, Makalah yang dipresentasikan dan artikel Populer terpilih

Penelitian (dalam bahasa Inggris):

1. *Development of Cooperation as an Instrument in the Prevention of Terrorism*. Anggota tim peneliti, Departemen Luar Negeri Denmark dan *Nordic Institute of Asian Studies* (NIAS), Denmark. 2003.
2. *Between Secularisation and Islamisation of Policy: Indonesia's Foreign Policy Toward the Muslim World in The Soeharto Era*. Ph.D Thesis, Dept. of Asian Studies, Flinders University, Adelaide-Australia (2002).

Penelitian (dalam bahasa Indonesia):

1. *Analisis Anggaran Belanja Militer: Studi Komparasi*. Anggota tim Peneliti. INFID dan Pusat Studi Keamanan Nasional UNPAD (2007).
2. *Analisis Ketahanan Pangan di Indonesia: Studi kasus Kota Semarang*. Ketua tim peneliti, FISIP-LPM UNPAR (2006).
3. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Terorisme di Jawa Barat*. Anggota tim peneliti, Menkopolhukam dan PACIS UNPAR (2006).
4. *Integrasi, Kohesivitas Bangsa dan Politik Luar Negeri Indonesia*, BPPK-Deplu RI dan PACIS UNPAR (2003).

Buku (dalam bahasa Inggris):

1. *Security Border Management in Indonesia*. A contributing chapter of the book "*Almanac Indonesia 2007: Security Sector Reform in Indonesia*". Beni Sukadis. Ed. Jakarta: Lespersi (2007). ISBN: 978-979-25-2031-6.
2. *National Border Management and Security Problems in Indonesia*. In "*Border Management Reform: In Transition Democracies*". Aditya Batara, Beni Sukadis. Eds. Jakarta: LESPERSSI and DCAF (Switzerland). ISBN: 978-979-1290-01-2. (2007)

3. *Indonesia and the Muslim World: Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond*. Copenhagen: NIAS Press, 2007. ISBN: 10-87-91114-92-2. (2007).
4. *Democratization and Foreign Policy in Indonesia: The Impact of Islamic "Symbolic Politics" on Post-Soeharto Foreign Policy*. A contributing chapter of the book "*Democracy in Indonesia: The Challenge of Consolidation*". Bob S. Hadiwinata, Christopher Schuck. Eds. Munich: Nomos Verlag. ISBN: 13-978-3-8329-2374-7. (2007).
5. *Globalization, Radical Islam And "Religious" Conflict in Indonesia*. A contributing chapter of the book "*Understanding and managing Militant Movements in Southeast Asia*". Ed. Kamarulzaman Askandar. Penang: Universiti Sains Malaysia. ISBN: 983-3391-01-X. (2006).
6. *Democracy, The issue of Terrorism and Security Sector Reform in Indonesia*. A contributing chapter of the book "*Democratization and the Issue of Terrorism in Indonesia*". Eds. Norbert Eschborn, Joyce Holmes Richardson, Henrietta Litta. Jakarta: Konrad Adenaur Stiftung. ISBN: 979-99134-2-x. (2005).
7. *New Strategic Partnership in Asia Africa*. A contributing book chapter in "*Asia African Movement*". Ed. Bantarto Bandoro. Jakarta: CSIS. (2005).
8. *Global Terrorist Threat and Regional Responses: The Case of ASEAN*. A contributing chapter of the book "*Understanding Global Politics: Issues and Trends*". Ed. Majumdar, Anindyo, Shibashis, Chatterjee, Calcutta: Lancer's Book. (2004).

Buku (dalam bahasa Indonesia):

1. Lumpur Panas Sidoarjo dan Perspektif Keamanan Global. Kontributor dalam buku "Lumpur Panas Sidoarjo: Jangan Biarkan Kami Tenggelam". Ed. Muradi. Bandung. PSKN Unpad. ISBN: 978-979-16623-0-7 (2007).
2. Redefinisi Konsep Keamanan: Pandangan Realisme dan Neo-Realisme. Kontributor dalam buku "*Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*". Ed. Yulius P. Hermawan. Yogyakarta: PT Graha Ilmu. ISBN: 978-979-756-201-4 (2007).
3. Tanggapan atas Kajian Kritis terhadap UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Kontributor dalam buku *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional*. Ed. T Hari Prihatono. Jakarta: ProPatria Institute. ISBN: 979-96229-5-6. (2006).
4. Editor, "*Rekam Jejak SSR di Indonesia*". Jakarta: ProPatria Institute. ISBN: 979-96229-4-4. (2006).
5. Pengelolaan Keamanan Maritim Secara Terpadu. Kontributor dalam buku "*Quo Vadis Indonesia: Problem and Solution*". Eds: Indraswari, A Kristian Pakpahan, Maria Harni, Theresia Gunawan. Bandung: FISIP UNPAR. ISBN: 979-97319-1-7 (2006).
6. Editor, "*Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*". Jakarta: ProPatria Institute. ISBN: 979-96229-3-X. (2006).
7. Isu Keamanan Non-Tradisional dan Desain baru Politik Luar Negeri Indonesia. Kontributor dalam buku "*Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*". Ed. Bantarto Bandoro. Jakarta: CSIS. ISBN: 979-21-1200-6. (2005).
8. Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika: Tantangan dan Peluang. Kontributor dalam buku "*Percikan Pemikiran: Membangun Jembatan Emas Persahabatan, Solidaritas, dan Kemitraan Diantara Negara-Negara Asia Afrika*". Ed. Asep Warlan Yusuf, Sri Rahayu Oktoberina.

- Bandung: Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan REAL Institute. ISBN: 979-3838-05-1. (2005).
9. *"Pengantar Ilmu Hubungan Internasional"*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. ISBN: 979-692-384-X. (2005).
 10. Hasnan Habib dan Perkembangan Kajian Strategis di Indonesia. Kontributor dalam buku *"75 Tahun Hasnan Habib: Jenderal Pemikir dan Diplomat"*. Ed. Edy Prasetyono, Clara Yuwono, Hadi Soesastro. Jakarta: CSIS (2003), ISBN: 979-8026-81-0.

Jurnal Internasional:

1. Islam's Symbolic Politics. *Jurnal Melintas : A Quarterly Journal of Philosophy and Religion*. Vol. 22. No. 3, March 2007.
2. The Impact of Territorial Border Problems on Indonesia's Security. *In The Indonesian Quarterly*, Vol. 34. No. 3. 2006.
3. Islam Symbolic Politics, Democratization and Indonesian Foreign Policy. *Working Paper No. 4, Centro Argentino de Estudios Internacionales*. Buenos Aires, Argentina. December 2005.
4. Terrorism, Democratization and Security Sector Reform in Indonesia. *Working Paper No. 11, Indonesia Research Unit, Justus-Liebig Universitat Giessen, Germany*. December 2005.
5. Security Sector Reform in Indonesia. An academic article published by *Journal of Security Sector Management*, University of Cranfield, UK. Vol, 2, December 2004.
6. ASEAN and the Issue of Terrorist Threats. An academic article published in *NIASNytt*. No.3 by NIAS, Copenhagen-Denmark. September 2003.
7. Indonesia's changing Role in OIC: Is It A "Necessity of Foreign Policy". Academic Article published by *The Indonesian Quarterly-CSIS*, No.1/2003. June 2003.

Jurnal Nasional:

1. Agenda dan Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Sebuah Refleksi Teoritis. *Jurnal GLOBAL: Jurnal Politik Internasional UI*, Vol. 9, No. 1. Mei-November 2007.
2. Kebijakan Pertahanan Jepang. *Jurnal ANALISIS CSIS*. Jakarta, Mei 2007.
3. Isu Kepemimpinan dan Relevansinya Dengan Keamanan Nasional. *Jurnal SATRIA: Studi Pertahanan. Badiklat-Departemen Pertahanan*. Vol. 2. No. 3. Oktober 2006.
4. Kapasitas ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Internal di Myanmar. *Jurnal ANALISIS*, Vol. 35. No. 2, CSIS Jakarta. Juni 2006.
5. Isu Perbatasan Negara dan Keamanan Nasional. *Jurnal SATRIA: Studi Pertahanan. Badiklat - Departemen Pertahanan*. Vol. 2. No. 2. Mei 2006.
6. Signifikansi Reformasi Sektor Keamanan Bagi Indonesia. *Jurnal SATRIA: Studi Pertahanan*. Vol. 2. No. 1. Badiklat - Departemen Pertahanan. Februari 2006.
7. Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 24. No. 2. Juni 2006.
8. Kecenderungan Perkembangan Lingkungan Strategis dan Relevansinya Bagi Strategi Pertahanan Keamanan Indonesia. *Jurnal SATRIA: Studi Pertahanan*. Badiklat-Departemen Pertahanan. Vol. 1. No. 2. Agustus 2005.
9. Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika. *Jurnal ANALISIS CSIS*. Agustus 2005.
10. Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. *Jurnal SOSPOL: FISIPOL Universitas Gajah Mada*. Mei 2005.
11. Reformasi Dewan Keamanan PBB. *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 23. No. 1. Januari 2005.
12. Perubahan Lingkungan Keamanan Global dan Politik Luar Negeri AS. *Jurnal Hubungan Internasional, FISIP Unpar*. Vol. 1. No. 2, Mei 2005.

13. Keamanan Baru dan Tantangannya Bagi Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Pejambon: Departemen Luar Negeri*. Vol. 2. No. 6. Desember 2004.
14. Isu Keamanan Maritim di Selat Malaka. *Jurnal Global*, FISIP UI. Vol. 7. No. 1. November 2004.
15. Keamanan Manusia dan Relevansinya Bagi Indonesia. *Jurnal ANALISIS CSIS*. Vol. 1. No. 2. Juni 2003.
16. Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik di Mindanao. *Jurnal Hubungan Internasional*, FISIP Unpar. Juni 2003.

Makalah Internasional:

1. *Indonesia's Foreign Policy and the Challenge of New Strategic Partnership in Asia Africa*. Paper presented at the *Dialogue on the New Framework of Asia Africa Partnership*, in Egypt, Aljazair and Ethiopia. Organized by Directorate of Public Diplomacy, Department of Foreign Affairs, November 14-24, 2007.
2. *Global Terrorist threats and Regional Responds: The case of ASEAN*, paper presented at the *Workshop on Journalist visit Programme of South Pacific Dialogue and Pacific Island Forum*", organized by Ministry of Foreign Affairs, Hotel Borobudur, Jakarta, August 14, 2007.
3. Democracy and Security Sector Reform, presentation at the Summer School of "*Good Governance, Regional Cooperation, and the Transformation of the Security Sector in Indonesia*", University of Giessen and Parahyangan Centre for European Studies (PACES), funded by Federal Foreign Office-Germany, Bandung, June 20, 2007.
4. A People-Centered ASEAN Charter, a discussant paper presented at the *Roundtable Discussion on ASEAN Charter*, Organized by Department of Foerign Affairs, Hotel Nikko, Jakarta, June 14, 2007.
5. The Management of National Border and Indonesia's Security Problem. Paper presented at the International Seminar on "*Good Practices in Border Management and Border Security*", organized by

- SESKO TNI (TNI School of Staff Command) and *Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces (DCAF)*, Hotel Grand Preanger, Bandung, March 21, 2007.
6. Reinigorating Cooperation in The South China Sea. Paper presented at the 16th *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea*, organized by the Policy Planning and Development Agency of the Department of Foreign Affairs, Santika Beach Hotel, Bali, November 22-24, 2006.
 7. The war On Terror and Islamic Radicalism in Indonesia. Paper presented at *the International Conference on "Peace Building in Asia Pacific"*, Institute of Dispute Relations, Khon Kaen University, Thailand. June 30 - July 2, 2006.
 8. Islam and Indonesia's Foreign Policy in the Post Soeharto era and Beyond. A paper presented at the International Seminar "*Democracy in Indonesia*", organized by Giessen University and Parahyangan Centre for European Studies, Bandung. February 23-24, 2006.
 9. The Future of Asia African Movements. Paper presented at *the International Conference on Remembering the Bandung Spirit*, organized by India's Foreign Ministry and Jawaharlal Nehru University, New Delhi-India. April 26-29, 2005.
 10. "Good Governance and the Role of the Armed Forces in a Democracy". Paper presented at *The Clingendael Institute of International Relations*, Denhaag-Netherlands, March 13, 2004.
 11. Islam, Globalization and Religious Conflict in Indonesia. Paper presented at *the SEACSN Conference "Issues and Challenges for Peace and Conflict Resolution in Southeast Asia"*. Shangri-La Hotel, Penang, Malaysia, January 12-15, 2004
 12. Security Sector Reform in Indonesia: The Case of Indonesia's Defence White Paper 2003. Paper presented at *Regional Workshop on "State and Civil Society in Southeast Asia: Toward Democratic Conflict Resolution"* organized by Southeast Asia conflict Studies Network. Hotel Raddin, Sanur-Bali, October 15-17, 2003.

Makalah Nasional:

1. "Doktrin dan Pertahanan", makalah yang dipresentasikan pada Pelatihan "Advokasi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), 14 Desember 2007, Hotel Cemara Jakarta.
2. "Pendidikan Kader Bela Negara", makalah penanggung utama pada Forum Komunikasi Pendidikan Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Pertahanan RI, 13 Desember 2007, Badiklat Dephan RI.
3. Membangun Kembali Perdamaian di Filipina Selatan: Perspektif Akademis. Makalah yang dipresentasikan pada Diskusi Sehari "Membangun Kembali Perdamaian di Filipina Selatan: Kemungkinan dan Peranan Indonesia", diselenggarakan oleh Biro Hubungan Internasional, Kedeputusan Politik, Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UNPAR, Hotel Panghegar, Bandung, 27 November 2007.
4. "Problema Hubungan TNI-Polri", makalah dalam kuliah Panel, Studi Pertahanan ITB, Hotel Grand Aquila, Bandung, 11 September 2007.
5. "Pengembangan Kebijakan Keamanan Nasional", Rapat Kerja Terbatas Dewan Ketahanan Nasional, Hotel Sahid, Jakarta, 28-30 Agustus 2007.
6. "Pasifik Selatan: Konsep Kerjasama Kawasan Baru". Makalah yang dipresentasikan pada Pertemuan Kelompok Ahli "Arah kebijakan Luar Negeri RI di Pasifik Selatan", diselenggarakan oleh BPPK, Deplu RI, Hotel Sheraton, Bandung, 29 Agustus 2007
7. "Soft Power dan Politik Luar Negeri RI", makalah yang dipresentasikan pada Seminar "Optimalisasi Soft Power dalam Politik Luar Negeri RI", diselenggarakan oleh BPPK Deplu RI dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Unpar, Bandung, 9 Agustus 2007.
8. "ASEAN Security Community dan Isu Keamanan Non-Tradisional", makalah yang dipresentasikan pada Seminar Nasional ASEAN 40th Anniversary, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerjasama

- ASEAN, Deplu RI dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UNPAR, Bandung, 8 Agustus 2007.
9. "Perang Informasi dan Ketahanan Nasional Indonesia", Rapat Kerja Terbatas Dewan Ketahanan Nasional, Hotel Saphire, Yogyakarta, 17-19 Juli 2007.
 10. "Posisi Indonesia dan Konflik di Thailand Selatan," Pertemuan Terbatas Sekretariat Wakil Presiden RI, Hotel Inna, Surabaya, 12 Juli 2007
 11. "Kebijakan Keamanan Nasional RI Masa Depan", Rapat Kerja Terbatas Dewan Ketahanan Nasional, Hotel Bumi Minang, Padang, 5-7 Juni 2007.
 12. "Kebijakan Luar Negeri RI di Timur Tengah", Pertemuan Terbatas Sekretariat Wakil Presiden RI, Hotel Garuda Plaza, Medan, 25-27 Mei 2007.
 13. "Kebijakan Luar Negeri RI terhadap Konflik Kosovo", Pertemuan Terbatas Politik Luar Negeri RI di Eropa, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 4 Mei 2007.
 14. Isu dan Tantangan Keamanan Energi Dan Hubungan Internasional Kontemporer. Makalah yang dipresentasikan pada Seminar Nasional "Keamanan Energi Global". Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP-UNPAR, Hotel Holiday Inn, 14 April 2007.
 15. Prospek Kerjasama Indonesia dengan Rusia dan Uni Eropa. Makalah yang dipresentasikan pada *Pertemuan Kelompok Ahli "Kemitraan Rusia-Uni Eropa: Implikasi Strategisnya Bagi Indonesia*. BPPK-Deplu RI, Hotel Santika, Bandung, 3-4 April 2007.
 16. Prospek Kerjasama Indonesia dengan Rusia dan Uni Eropa: Kini dan Masa Datang. Jurnal Luar Negeri: Departemen Luar Negeri RI. Vol.24. No.1, April 2007
 17. Format Laporan Belanja Militer Indonesia, Seminar Laporan Penelitian Belanja Militer Indonesia, Pusat Studi Keamanan Nasional, Universitas Padjadjaran, 22 Maret 2007.

18. Peran Jepang Dalam Memelihara Stabilitas Keamanan Asia Pasifik. Makalah dipresentasikan pada *Pertemuan Kelompok Ahli "Reorientasi Kebijakan Pertahanan Jepang dan Implikasinya bagi Kawasan Asia Timur"*. BPPK-Deplu RI, Hotel Savoy Homan, Bandung, 26-27 Februari 2007.
19. Penguatan Sistem Politik Nasional dan Politik Luar Negeri RI, *Rapat Kerja Terbatas Dewan Ketahanan Nasional "Penguatan Sistem Politik Nasional Dalam Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Presidensial"*, Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, 20-22 Februari 2007.
20. Prospek dan Prioritas Kerjasama Politik Keamanan Indonesia-Vietnam. Makalah dipresentasikan pada *Pertemuan Kelompok Ahli "Prospek Kerjasama Strategis Indonesia-Vietnam"*, BPPK-Departemen Luar Negeri, Hotel Santika Yogyakarta, 18-19 Desember 2006.
21. Isu Keamanan Maritim Nasional dan Regional. Makalah dipresentasikan dalam *Kursus Singkat Fakultas Hukum, Bagian Hukum Internasional, Universitas Padjadjaran*, Bandung, 13 Desember 2006.
22. Peran Pendidikan Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Makalah dipresentasikan dalam *Forum Komunikasi, Badiklat Departemen Pertahanan*. Jakarta, 28-29 November 2006.
23. Politik Luar Negeri Indonesia: Agenda dan Tantangan. Makalah dipresentasikan dalam *Pertemuan Kelompok Ahli "Masa Depan Politik Luar Negeri RI"*, BPPK Departemen Luar Negeri, Yogyakarta, 7-8 September 2006.
24. Isu Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Keamanan Internasional. Makalah dipresentasikan pada *Pertemuan Kelompok Ahli "Isu Nuklir Iran dan Politik Luar Negeri Iran"*, BPPK Departemen Luar Negeri, Hotel Novotel Solo, 27-28 April 2006.
25. Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia dan Gerakan Asia Afrika. Makalah dipresentasikan pada *Pertemuan Kelompok Ahli BPPK Departemen Luar Negeri*, Makassar, 21-22 Maret 2006.

26. Inisiatif dan Kapasitas ASEAN dalam penyelesaian Konflik Myanmar. Makalah dipresentasikan pada *Pertemuan Kelompok Ahli, BPPK Departemen Luar Negeri, Hotel Arjuna Bandung, 6 Februari 2006.*
27. Dinamika Hubungan Internasional Kontemporer. Makalah dipresentasikan pada *Simposium "Perkembangan Teroritis Hubungan Internasional Kontemporer"* , Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta, 16-18 Januari 2006.
28. Manajemen Keamanan Maritim di Selat Malaka. Makalah dipresentasikan pada *Pertemuan Kelompok Ahli "Pengelolaan Keamanan Maritim di Selat Malaka, BPPK Departemen Luar Negeri, Hotel Gran Angkasa Medan, 19-20 Juli 2005.*
29. Reformasi Dewan Keamanan PBB: Antara Idealisme dan Realitas. Makalah dipresentasikan pada *Pertemuan Kelompok Ahli "Reformasi PBB"*, BPPK Departemen Luar Negeri RI, Hotel Jayakarta Bandung, 4 Oktober 2004.
30. Dampak Perluasan UE bagi Indonesia. Makalah dipresentasikan pada *Pertemuan Kelompok Ahli "Perluasan UE dan Politik Luar Negeri RI, BPPK Departemen Luar Negeri, Hotel Mercure Yogyakarta, 11-12 Agustus 2004.*
31. Kerjasama Regional Maritim di Asia Tenggara. Makalah dipresentasikan pada *Pertemuan Kelompok Ahli "Prospek Kerjasama Maritim di Asia Tenggara" BPPK Departemen Luar Negeri, Hotel Hyatt Regency, Surabaya, 21-22 April 2004.*
32. Peningkatan Peran Indonesia di ARF. Makalah dipresentasikan pada *Pertemuan Kelompok Ahli "Posisi Indonesia Sebagai Ketua ARF" BPPK Departemen Luar Negeri, Hotel Gran Candi Semarang, 22-24 Agustus 2003.*
33. Redefinisi Konsep Keamanan dan Relevansinya pada Pertahanan Negara. Makalah dipresentasikan pada *Seminar Pertahanan Negara, Departemen Pertahanan, Hotel Mandarin Jakarta, 8 Januari 2003.*

Artikel Opini (Pilihan):

1. *Myanmar: Culture of Violence vs Culture of Peace*, Majalah Esquire Indonesia, November 2007.
2. *Harga Minyak dan Energi Global*, Harian KOMPAS, 18 Oktober 2007.
3. *ASEAN dan Isu Keamanan Non-Tradisional*, Harian Jurnal Nasional, 7 Agustus 2007.
4. *ASEAN yang Lebih Merakyat*, harian KOMPAS, 26 Juli 2007.
5. *Kontroversi DCA Indonesia-Singapura*, Harian Jurnal Nasional, 11 Juli 2007.
6. *Pengaturan Keamanan Nasional Terpadu*, Harian KOMPAS, 5 Juni 2007.
7. *Dewan HAM dan Politik Luar Negeri RI*, Harian Jurnal Nasional, 28 Mei 2007.
8. *Perjanjian Ekstradisi dan Pertahanan Indonesia-Singapura*, Harian Jurnal Nasional, 30 April 2007.
9. *Isu Keamanan Energi Global*, Harian KONTAN, 20 April 2007.
10. *Isu Nuklir Iran*, Majalah mingguan GATRA, No. 21, tahun XIII, 5-11 April 2007.
11. *Masa Depan Kemitraan Strategis Rusia-Uni Eropa*, Harian KOMPAS, 2 April 2007
12. *Lemahnya Manajemen Perbatasan Negara*, Harian KONTAN, 3 Maret 2007.
13. *Kontroversi Isu dan Aktor Keamanan Nasional*, *Harian Seputar Indonesia*, 20 Februari 2007.
14. *Sosok Baru Pertahanan Jepang*, *Harian KOMPAS*, 19 Februari 2007.
15. *Pendidikan dan Nasionalisme*, *Harian KOMPAS*, 18 Januari 2007.
16. *Politik Luar Negeri RI: Refleksi 2006*, *Harian Jurnal Nasional*, 28 Desember 2006.
17. *Makna Kemenangan Demokrat dan Politik Luar Negeri AS*, *Harian Jurnal Nasional*, 28 November 2006.
18. *The Management of Development in Border Zones*, *The Jakarta Post*, 9 Oktober 2006.

19. Iran's Nuclear Putting the Global Peace At Risk, *The Jakarta Post*, 14 September 2006.
20. HAM dan Politik Luar Negeri Indonesia, *Harian KOMPAS*, 20 Juni 2006.
21. Nuklir Iran dan Keamanan Internasional, *Harian KOMPAS*, 18 April 2006
22. Menlu AS dan Reformasi TNI, *Harian KOMPAS*, 14 Maret 2006.
23. Sembilan Opsi Kebijakan Luar Negeri AS, *Harian Sinar Harapan*, 13 Januari 2006.
24. Bom Bali II, *Harian Sinar Harapan*, 3 Oktober 2005.
25. KTT Dunia dan Konsensus Keamanan Baru, *Harian KOMPAS*, 14 September 2005.
26. Desain Baru Diplomasi Indonesia, *Harian KOMPAS*, 5 Agustus 2005.
27. A Comprehensive Security Policy for RI, *The Jakarta Post*, 26 Juli 2005.
28. Malnutrisi dan Keamanan Manusia, *Harian KOMPAS*, 20 Juni 2005.
29. Komunitas Asia Timur, *Harian Sinar Harapan*, 11 April 2005.
30. Challenges of New Strategic Partnership for Asia Africa, *The Jakarta Post*, 8 April 2005.
31. Will Democracy, Security Sector Reform Discourage Terrorism ? *The Jakarta Post*, 28 Maret 2005.
32. US Foreign Policy and The Muslim World, *The Jakarta Post*, 13 December 2004.
33. Indonesia, ARF dan Komunitas Keamanan Asia Tenggara, *Harian Sinar Harapan*, 18 Juni 2004.
34. Politik Luar Negeri RI Paska Pemilihan Persiden 2004, *Harian Sinar Harapan*, 27 Mei 2004.
35. SBY, Wiranto dan Strategokrasi, *Harian Sinar Harapan*, 12 Mei 2004.
36. Kebutuhan terhadap Pengembangan Kekuatan ALRI, *Harian Sinar Harapan*, 18 November 2003.
37. Demografi dan Keamanan Nasional, *Harian Sinar Harapan*, 29 Oktober 2003.
38. Memahami Buku Putih Pertahanan RI, *Harian KOMPAS*, 26 Mei 2003.
39. Indonesia's Changing Role in OIC, *The Jakarta Post*, 3 Maret 2003.

Susunan Acara
Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D
Gedung Serba Guna
Universitas Katolik Parahyangan
Sabtu, 12 Januari 2008.

- 10.00 Seluruh Tamu Undangan telah berada di Ruang Upacara
- 10.05 Prosesi Senat Universitas memasuki Ruang Upacara dipimpin oleh Pedel
- 10.10 Pembukaan Sidang Terbuka Senat Universitas Katolik Parahyangan oleh Ketua Senat Universitas
- 10.15 Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pengangkatan Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D menjadi Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional oleh Dekan FISIP UNPAR
- 10.25 Pembacaan Curriculum Vitae Prof. Anak Agung Banyu Perwita Ph.D oleh Bapak Bonggas Adhi Chandra, MA
- 10.35 Pembacaan Pidato Pengukuhan oleh Prof. Anak Agung Banyu Perrwita, Ph.D
- 11.00 Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional oleh Ketua Senat Universitas
- 11.05 Doa Syukur
- 11.15 Penyerahan Kalung Guru Besar dari Ketua Senat kepada Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D
- 11.20 Penutupan Sidang terbuka Senat Universitas oleh Ketua Senat Universitas
- 11.25 Prosesi Senat Universitas meninggalkan Ruang Upacara, sekaligus para anggota Senat Universitas memberikan ucapan selamat kepada Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D
- 11.40 Pemberian ucapan selamat kepada Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D beserta keluarga dari seluruh Tamu Undangan
- 12.00 Ramah Tamah dengan seluruh Tamu Undangan



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141
Telp. 022 203 2576 Fax. 022 203 1110
Website: www.unpar.ac.id